



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 151 TAHUN 2014

TENTANG

**PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI (TRANSAKSI NON-CASH)
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka pemantauan rekening pendapatan dan belanja SKPD/UKPD melalui Cash Management System (CMS) serta peningkatan dan percepatan transaksi non tunai (transaksi non-cash) termasuk untuk pembayaran kepada pihak ketiga, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Para Direktur Badan Usaha MiliK Daerah.

Untuk :

KESATU : Meminimalkan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan/pembayaran secara tunai pada masing-masing SKPD/UKPD dan BUMD.

KEDUA : Kepala SKPD/UKPD dalam melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, hibah dan bantuan sosial harus melalui mekanisme non tunai.

KETIGA : Guna kelancaran pembayaran atas jasa pihak ketiga Kepala SKPD/UKPD dan Direktur BUMD dihimbau agar pihak ketiga untuk membuka rekening pada Bank DKI selaku bank yang memegang rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT : Pembatasan transaksi pembayaran/penerimaan secara tunai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan batasan transaksi maksimum sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

KELIMA : Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinir dan memantau pelaksanaan Instruksi Gubernur ini sesuai dengan bidang tugasnya.

KEENAM : Pada saat Instruksi Gubernur ini berlaku, Instruksi Gubernur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Transaksi Online (Transaksi Non-Cash) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2014

a.n. Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,

HA

Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta